



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR
30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah;
30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
31. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
32. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
33. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.1.925.784.517.618,00 bertambah sejumlah Rp.27.691.448.000,00 sehingga menjadi Rp.1.938.241.570.618,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.849.689.814.603,92
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.691.448.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.877.381.262.603,92

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.925.784.517.618,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.691.448.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.1.938.241.570.618,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (76.094.703.014,08)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 76.594.703.014,08
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 76.594.703.014,08

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 76.094.703.014,08

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan lampiran Perubahan tercantum secara tersendiri yang merinci item perubahan pada Perangkat Daerah meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Desember 2024 M
17 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 


MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Desember 2024 M
17 Jumadil Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 


SULAIMI



KABUPATEN ACEH BESAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.777.368.964,92	175.777.368.964,92	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	104.778.398.671,92	104.778.398.671,92	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	37.020.397.450,00	37.020.397.450,00	0,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	35.220.397.450,00	35.220.397.450,00	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	35.220.397.450,00	35.220.397.450,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.513.728.841,00	38.513.728.841,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	38.513.728.841,00	38.513.728.841,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	38.513.728.841,00	38.513.728.841,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.973.272.380,92	11.973.272.380,92	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	11.973.272.380,92	11.973.272.380,92	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	11.973.272.380,92	11.973.272.380,92	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	27.858.508.293,00	27.858.508.293,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	23.117.508.293,00	23.117.508.293,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	21.299.308.293,00	21.299.308.293,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.149.308.293,00	2.149.308.293,00	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	19.150.000.000,00	19.150.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	798.200.000,00	798.200.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	298.200.000,00	298.200.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.741.000.000,00	3.741.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.976.000.000,00	1.976.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.976.000.000,00	1.976.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	372.000.000,00	372.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	372.000.000,00	372.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.860.673.196,00	5.860.673.196,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.860.673.196,00	5.860.673.196,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.860.673.196,00	5.860.673.196,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.860.673.196,00	5.860.673.196,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.279.788.804,00	37.279.788.804,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	6.155.326.804,00	6.155.326.804,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.155.326.804,00	6.155.326.804,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.155.326.804,00	6.155.326.804,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00	0,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	487.800.000,00	487.800.000,00	0,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	187.800.000,00	187.800.000,00	0,00
4.1.04.13.01.0024	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	187.800.000,00	187.800.000,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.206.662.000,00	2.206.662.000,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.206.662.000,00	2.206.662.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.206.662.000,00	2.206.662.000,00	0,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.646.061.753.932,00	1.673.753.201.932,00	27.691.448.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.553.117.165.130,00	1.580.808.613.130,00	27.691.448.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.115.839.500.130,00	1.128.296.553.130,00	12.457.053.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.829.165.000,00	19.829.165.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.559.002.000,00	2.559.002.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.541.397.000,00	6.541.397.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.251.481.000,00	1.251.481.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	233.929.000,00	233.929.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	339.513.000,00	339.513.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.562.975.000,00	3.562.975.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	11.113.000,00	11.113.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.992.405.000,00	2.992.405.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.337.350.000,00	2.337.350.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	800.641.423.000,00	813.706.957.000,00	13.065.534.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.02.0001	DAU	655.814.643.000,00	668.880.177.000,00	13.065.534.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.062.375.000,00	4.062.375.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	74.512.082.000,00	74.512.082.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	44.604.335.000,00	44.604.335.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.647.988.000,00	21.647.988.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	128.069.712.000,00	128.069.712.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.493.061.000,00	1.493.061.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.318.086.000,00	9.318.086.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.180.651.000,00	17.180.651.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.181.167.000,00	2.181.167.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	11.998.868.000,00	11.998.868.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	17.313.905.000,00	17.313.905.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	15.317.731.000,00	15.317.731.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.018.496.000,00	6.018.496.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.519.763.000,00	4.519.763.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	3.131.409.000,00	3.131.409.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	39.596.575.000,00	39.596.575.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	167.299.200.130,00	166.690.719.130,00	-608.481.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.257.660.000,00	45.257.660.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.745.000.000,00	1.745.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	76.491.495.200,00	72.493.088.200,00	-3.998.407.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	671.588.000,00	1.923.750.000,00	1.252.162.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	783.800.560,00	2.921.564.560,00	2.137.764.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	591.699.192,00	591.699.192,00	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.093.010.350,00	7.093.010.350,00	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.009.382.500,00	3.009.382.500,00	0,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	6.304.200.000,00	6.304.200.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.582.800.000,00	1.582.800.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.203.588.000,00	6.203.588.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	551.401.000,00	551.401.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.818.575.328,00	16.818.575.328,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.03.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	425.697.443.000,00	440.931.838.000,00	15.234.395.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	425.697.443.000,00	440.931.838.000,00	15.234.395.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	425.697.443.000,00	440.931.838.000,00	15.234.395.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.580.222.000,00	11.580.222.000,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	11.580.222.000,00	11.580.222.000,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	11.580.222.000,00	11.580.222.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.944.588.802,00	92.944.588.802,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	48.339.054.198,00	48.339.054.198,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.339.054.198,00	48.339.054.198,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.244.054.198,00	8.244.054.198,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	44.605.534.604,00	44.605.534.604,00	0,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	44.197.534.604,00	44.197.534.604,00	0,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	44.197.534.604,00	44.197.534.604,00	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.850.691.707,00	27.850.691.707,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.850.691.707,00	27.850.691.707,00	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	27.850.691.707,00	27.850.691.707,00	0,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	27.850.691.707,00	27.850.691.707,00	0,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	27.850.691.707,00	27.850.691.707,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.849.689.814.603,92	1.877.381.262.603,92	27.691.448.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.197.040.952.034,00	1.209.498.005.034,00	12.457.053.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	593.719.637.002,00	606.176.690.002,00	12.457.053.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	446.023.886.911,00	446.187.086.911,00	163.200.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	333.906.605.696,00	333.994.069.421,00	87.463.725,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	312.571.210.136,00	312.647.329.021,00	76.118.885,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	21.335.395.560,00	21.346.740.400,00	11.344.840,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.593.114.907,00	30.600.858.845,00	7.743.938,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.443.737.800,00	28.451.105.050,00	7.367.250,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.149.377.107,00	2.149.753.795,00	376.688,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.917.707.801,00	8.977.172.801,00	59.465.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.916.227.801,00	8.975.692.801,00	59.465.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.201.433.044,00	22.257.485.694,00	56.052.650,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.730.236.544,00	21.781.787.504,00	51.550.960,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	471.196.500,00	475.698.190,00	4.501.690,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.241.772.530,00	3.244.732.530,00	2.960.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.186.130.830,00	2.186.130.830,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.055.641.700,00	1.058.601.700,00	2.960.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.828.146.800,00	17.827.272.562,00	-874.238,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.488.616.706,00	16.486.127.628,00	-2.489.078,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.339.530.094,00	1.341.144.934,00	1.614.840,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.166.223.545,00	4.155.985.885,00	-10.237.660,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.074.438.411,00	4.064.200.751,00	-10.237.660,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	91.785.134,00	91.785.134,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.874.559,00	18.939.965,00	65.406,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.893.655,00	17.893.767,00	112,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	980.904,00	1.046.198,00	65.294,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.020.127.092,00	21.980.594.705,00	-39.532.387,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.029.935.642,00	20.989.703.839,00	-40.231.803,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	990.191.450,00	990.890.866,00	699.416,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	785.934.310,00	781.764.982,00	-4.169.328,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	65.934.310,00	61.764.982,00	-4.169.328,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.343.946.627,00	2.348.209.521,00	4.262.894,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	143.946.627,00	148.209.521,00	4.262.894,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	38.716.872.521,00	51.619.206.521,00	12.902.334.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.106.773.596,00	5.166.918.844,00	60.145.248,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.106.773.596,00	5.166.918.844,00	60.145.248,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	0,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	601.605.764,00	601.605.764,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	312.855.764,00	312.855.764,00	0,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	288.750.000,00	288.750.000,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	105.841.428,00	105.841.428,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	105.841.428,00	105.841.428,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	31.621.051.733,00	44.463.240.485,00	12.842.188.752,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	31.621.051.733,00	43.586.940.485,00	11.965.888.752,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	0,00	876.300.000,00	876.300.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.082.993.566,00	90.474.512.566,00	-608.481.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.106.919.566,00	4.106.919.566,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	102.300.000,00	102.300.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	101.250.000,00	101.250.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.127.367.437,00	1.127.367.437,00	0,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	40.125.000,00	40.125.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	900.000,00	900.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.238.416.507,00	1.238.416.507,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	524.060.616,00	524.060.616,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	922.500.006,00	922.500.006,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	310.690.000,00	310.690.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	88.190.000,00	88.190.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	78.654.132.000,00	74.655.725.000,00	-3.998.407.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	78.654.132.000,00	74.655.725.000,00	-3.998.407.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	934.324.000,00	3.072.088.000,00	2.137.764.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	934.324.000,00	3.072.088.000,00	2.137.764.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	671.588.000,00	1.923.750.000,00	1.252.162.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	671.588.000,00	1.923.750.000,00	1.252.162.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.418.690.000,00	5.418.690.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.505.160.000,00	4.505.160.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	357.280.000,00	357.280.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	556.250.000,00	556.250.000,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	986.650.000,00	986.650.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	974.650.000,00	974.650.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.250.284.004,00	17.250.284.004,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	879.690.000,00	879.690.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	879.690.000,00	879.690.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.355.600,00	140.355.600,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.355.600,00	140.355.600,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	147.736.800,00	147.736.800,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	147.736.800,00	147.736.800,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	69.980.000,00	69.980.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	69.980.000,00	69.980.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.275.550.500,00	1.275.550.500,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.275.550.500,00	1.275.550.500,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.596.000,00	109.596.000,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.596.000,00	109.596.000,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.548.900,00	19.548.900,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.548.900,00	19.548.900,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.620.000.000,00	4.620.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.620.000.000,00	4.620.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	40.500,00	40.500,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	40.500,00	40.500,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.663.925.704,00	3.663.925.704,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.925.704,00	12.925.704,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.556.000.000,00	3.556.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00	335.160.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00	335.160.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
5.1.01.05.12	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
5.1.01.05.12.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	561.600.000,00	561.600.000,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.910.223.432,00	466.910.223.432,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	98.014.175.268,00	98.025.045.268,00	10.870.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	97.721.136.768,00	97.732.006.768,00	10.870.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	450.585.474,00	450.585.474,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.025.633.444,00	1.025.633.444,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.471.094.854,00	1.468.891.654,00	-2.203.200,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.200.146.930,00	4.200.146.930,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.514.990.024,00	2.514.990.024,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	289.804.430,00	289.804.430,00	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8.154.866.390,00	8.154.866.390,00	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	569.250.000,00	569.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	25.481.337,00	25.481.337,00	0,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	1.744.500.000,00	1.744.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.635.259.250,00	9.626.566.310,00	-8.692.940,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.971.898.549,00	1.981.551.649,00	9.653.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	777.958.197,00	778.828.197,00	870.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.127.500,00	250.127.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.893.312.269,00	1.895.869.609,00	2.557.340,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.546.574.265,00	2.549.927.465,00	3.353.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.654.446.394,00	1.654.446.394,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	177.607.625,00	177.607.625,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	809.350.001,00	809.350.001,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Candera Mata	990.700.000,00	990.700.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	425.818.750,00	425.818.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.255.887.544,00	8.255.887.544,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.523.590.000,00	21.523.590.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.218.956.500,00	1.218.956.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	770.284.698,00	770.284.698,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	236.400.323,00	235.366.323,00	-1.034.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.799.871.256,00	1.799.871.256,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.763.159.361,00	9.763.159.361,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.747.323.903,00	4.753.690.403,00	6.366.500,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	197.820.000,00	197.820.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.592.800.000,00	2.592.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	447.695.000,00	447.695.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	346.950.000,00	346.950.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	909.300.000,00	909.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	607.500.000,00	607.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	360.795.000,00	360.795.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	262.707.500,00	262.707.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	557.200.000,00	557.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	138.200.000,00	138.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	141.500.000,00	141.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	768.350.000,00	768.350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	264.380.000,00	264.380.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	293.038.500,00	293.038.500,00	0,00
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH(Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0205	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	57.143.500,00	57.143.500,00	0,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	28.770.000,00	28.770.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0511	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	231.673.152.052,00	231.704.402.052,00	31.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	202.472.625.103,00	202.513.875.103,00	41.250.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.134.030.500,00	3.134.030.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.186.764.000,00	11.228.014.000,00	41.250.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	491.460.000,00	491.460.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	992.350.000,00	992.350.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	379.200.000,00	379.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.644.800.000,00	5.644.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	34.930.514.800,00	34.930.514.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	124.600.000,00	124.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	637.820.000,00	637.820.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.971.750.000,00	2.971.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.097.600.000,00	2.097.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	537.000.000,00	537.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	657.175.000,00	657.175.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.021.800.000,00	1.021.800.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.687.500.000,00	31.687.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	257.100.000,00	257.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.813.632.000,00	9.813.632.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.916.220.000,00	2.916.220.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	813.605.000,00	813.605.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	5.254.000.000,00	5.254.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	193.200.000,00	193.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Pertolmbaan/Pertandingan	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	633.600.000,00	633.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	265.500.000,00	265.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	98.575.000,00	98.575.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	144.352.000,00	144.352.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	446.567.000,00	446.567.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	582.400.000,00	582.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	197.928.000,00	197.928.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	37.825.915.525,00	37.825.915.525,00	0,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	247.200.000,00	247.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	131.711.552,00	131.711.552,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.186.350.400,00	1.186.350.400,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.678.095.942,00	6.678.095.942,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah	316.676.000,00	316.676.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.911.639.644,00	2.911.639.644,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	349.642.740,00	349.642.740,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	33.600.000.000,00	33.600.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	350.400.000,00	350.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	638.950.000,00	638.950.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	78.790.000,00	78.790.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.078.856.400,00	3.078.856.400,00	0,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	127.620.000,00	127.620.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	275.500.000,00	275.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	77.610.000,00	77.610.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.177.626.400,00	2.177.626.400,00	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.392.372.000,00	1.392.372.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.272.372.000,00	1.272.372.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.411.689.542,00	15.411.689.542,00	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	8.812.105.351,00	8.812.105.351,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.449.584.191,00	6.449.584.191,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.153.659.007,00	8.143.659.007,00	-10.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.139.414.007,00	7.139.414.007,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.014.245.000,00	1.004.245.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	30.262.885.867,00	30.262.885.867,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.347.208.015,00	21.347.208.015,00	0,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.639.744.215,00	13.713.964.215,00	74.220.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	103.860.000,00	103.860.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.133.187.000,00	1.058.967.000,00	-74.220.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.863.440.000,00	2.863.440.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	335.480.000,00	335.480.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.772.000,00	32.772.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	704.854.800,00	704.854.800,00	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	125.150.000,00	125.150.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	966.200.000,00	966.200.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	331.120.000,00	331.120.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.945.888.752,00	3.945.888.752,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.945.888.752,00	3.945.888.752,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.969.789.100,00	4.969.789.100,00	0,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.446.000.000,00	1.446.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	3.329.539.100,00	3.329.539.100,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	194.250.000,00	194.250.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.317.634.245,00	51.275.514.245,00	-42.120.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.167.634.245,00	51.125.514.245,00	-42.120.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.422.418.986,00	13.461.370.986,00	38.952.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.023.138.113,00	9.023.138.113,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.722.077.146,00	28.641.005.146,00	-81.072.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	853.650.000,00	853.650.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	793.650.000,00	793.650.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	288.650.000,00	288.650.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	31.882.904.000,00	31.882.904.000,00	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	31.882.904.000,00	31.882.904.000,00	0,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	31.882.904.000,00	31.882.904.000,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.905.822.000,00	22.905.822.000,00	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.905.822.000,00	22.905.822.000,00	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.905.822.000,00	22.905.822.000,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	574.500.000,00	574.500.000,00	0,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	574.500.000,00	574.500.000,00	0,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	574.500.000,00	574.500.000,00	0,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	574.500.000,00	574.500.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	114.376.725.120,00	114.376.725.120,00	0,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.061.619.999,00	14.061.619.999,00	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	0,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.361.619.999,00	6.361.619.999,00	0,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.361.619.999,00	6.361.619.999,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	83.805.185.180,00	83.805.185.180,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.691.500.000,00	47.691.500.000,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	46.190.000.000,00	46.190.000.000,00	0,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.501.500.000,00	1.501.500.000,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.274.702.000,00	3.274.702.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.374.702.000,00	2.374.702.000,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.763.983.180,00	31.763.983.180,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.230.000.000,00	4.230.000.000,00	0,00

h

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.533.983.180,00	27.533.983.180,00	0,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.05.05.04.0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	8.321.780.000,00	8.321.780.000,00	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.321.780.000,00	8.321.780.000,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.321.780.000,00	8.321.780.000,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	695.339.941,00	695.339.941,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	695.339.941,00	695.339.941,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	695.339.941,00	695.339.941,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	7.492.800.000,00	7.492.800.000,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.045.600.000,00	6.045.600.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.045.600.000,00	6.045.600.000,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.447.200.000,00	1.447.200.000,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.447.200.000,00	1.447.200.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.459.866.480,00	21.459.866.480,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	19.076.866.480,00	19.076.866.480,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14.013.000.000,00	14.013.000.000,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	14.013.000.000,00	14.013.000.000,00	0,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.063.866.480,00	5.063.866.480,00	0,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.063.866.480,00	5.063.866.480,00	0,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.383.000.000,00	2.383.000.000,00	0,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.383.000.000,00	2.383.000.000,00	0,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.383.000.000,00	2.383.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	169.628.500.878,00	169.628.500.878,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.394.205.834,00	45.394.205.834,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	103.600.000,00	103.600.000,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	103.600.000,00	103.600.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	103.600.000,00	103.600.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	17.381.500.000,00	17.381.500.000,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	17.381.500.000,00	17.381.500.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.710.000.000,00	3.710.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.371.500.000,00	1.371.500.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	11.615.000.000,00	11.615.000.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	946.164,00	946.164,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	946.164,00	946.164,00	0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	946.164,00	946.164,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.280.009.165,00	9.280.009.165,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.679.528.600,00	1.679.528.600,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.194.168.400,00	1.194.168.400,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	485.360.200,00	485.360.200,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.600.480.565,00	7.600.480.565,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.397.195.565,00	5.397.195.565,00	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	885.190.000,00	885.190.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.235.595.000,00	1.235.595.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	778.900.000,00	778.900.000,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	678.900.000,00	678.900.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	678.900.000,00	678.900.000,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.02.06.03.0020	Belanja Modal Switcher/Menara Antena	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.515.287.000,00	5.515.287.000,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.515.287.000,00	5.515.287.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.463.487.000,00	1.463.487.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.074.000.000,00	1.074.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.977.800.000,00	2.977.800.000,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.249.781.200,00	1.249.781.200,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	129.781.200,00	129.781.200,00	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	129.781.200,00	129.781.200,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.304.552.305,00	9.304.552.305,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.247.758.131,00	8.247.758.131,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.247.758.131,00	8.247.758.131,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.056.794.174,00	1.056.794.174,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	846.408.574,00	846.408.574,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	210.385.600,00	210.385.600,00	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	0,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	0,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	231.630.000,00	231.630.000,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	231.630.000,00	231.630.000,00	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	231.630.000,00	231.630.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.766.890.520,00	59.766.890.520,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	57.819.700.520,00	57.819.700.520,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	57.819.700.520,00	57.819.700.520,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.572.523.130,00	7.572.523.130,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	24.110.003.066,00	24.110.003.066,00	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	139.476.750,00	139.476.750,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.907.697.574,00	25.907.697.574,00	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.947.190.000,00	1.947.190.000,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.947.190.000,00	1.947.190.000,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.947.190.000,00	1.947.190.000,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.056.518.524,00	56.056.518.524,00	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	40.936.728.700,00	40.936.728.700,00	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	39.936.328.700,00	39.936.328.700,00	0,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	34.539.046.000,00	34.539.046.000,00	0,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	5.397.282.700,00	5.397.282.700,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.000.400.000,00	1.000.400.000,00	0,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.000.400.000,00	1.000.400.000,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.938.789.824,00	8.938.789.824,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.476.902.364,00	8.476.902.364,00	0,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.476.902.364,00	8.476.902.364,00	0,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	461.887.460,00	461.887.460,00	0,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	461.887.460,00	461.887.460,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	6.181.000.000,00	6.181.000.000,00	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	0,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	2.896.000.000,00	2.896.000.000,00	0,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.896.000.000,00	2.896.000.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.410.886.000,00	8.410.886.000,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.023.710.000,00	1.023.710.000,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.023.710.000,00	1.023.710.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	221.360.000,00	221.360.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	449.950.000,00	449.950.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.387.176.000,00	7.387.176.000,00	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.387.176.000,00	7.387.176.000,00	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.387.176.000,00	7.387.176.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	555.315.064.706,00	570.549.459.706,00	15.234.395.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.767.057.386,00	15.767.057.386,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.263.206.557,00	13.263.206.557,00	0,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	0,00	0,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	0,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.263.206.557,00	13.263.206.557,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.263.206.557,00	13.263.206.557,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.503.850.829,00	2.503.850.829,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.503.850.829,00	2.503.850.829,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.503.850.829,00	2.503.850.829,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	539.548.007.320,00	554.782.402.320,00	15.234.395.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	539.548.007.320,00	554.782.402.320,00	15.234.395.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	539.548.007.320,00	554.782.402.320,00	15.234.395.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	425.697.443.000,00	440.931.838.000,00	15.234.395.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	113.850.564.320,00	113.850.564.320,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.925.784.517.618,00	1.953.475.965.618,00	27.691.448.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-76.094.703.014,08	-76.094.703.014,08	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.594.703.014,08	76.594.703.014,08	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.594.703.014,08	76.594.703.014,08	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	76.594.703.014,08	76.594.703.014,08	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH(Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	76.594.703.014,08	78.594.703.014,08	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	76.594.703.014,08	76.594.703.014,08	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	76.594.703.014,08	76.594.703.014,08	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	76.094.703.014,08	76.094.703.014,08	0,00
8.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Aceh Besar, 19 Desember 2024

J.Pj Bupati 



MUHAMMAD ISWANTO







MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 416 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN
2024 DALAM RANGKA DUKUNGAN PENDANAAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI GURU
APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
 - c. bahwa terdapat perubahan rincian anggaran transfer ke daerah berupa tambahan dana alokasi umum sebagai akibat dari perubahan data atas pemberian komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan

- penghasilan tahun anggaran 2024, sebagai bentuk dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (14) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik, dan/atau perubahan perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri dan/atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri, ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 DALAM RANGKA DUKUNGAN PENDANAAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH.**

- KESATU** : Menetapkan perubahan rincian alokasi dana alokasi umum berupa rincian alokasi tambahan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah dalam rangka pemberian dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pegawai aparatur sipil negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.877.820.308.000,00 (lima triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

- KEDUA : Rincian alokasi tambahan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Perhitungan rincian alokasi tambahan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah menyampaikan data jumlah aparatur sipil negara guru yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah/tambahan perbaikan penghasilan atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta data jumlah tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan yang dibayarkan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Sekretaris Daerah dan Surat Hasil Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah atas kebenaran data.
 - b. Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan data yang telah diterima oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui arsip data komputer paling lambat tanggal 16 Agustus 2024.
 - c. Penyaluran hanya dilakukan untuk data yang sesuai dengan SPTJM dan/atau Surat Hasil Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah.
 - d. Rincian alokasi Dana Alokasi Umum sebagai tambahan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung berdasarkan rata-rata tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan per pegawai aparatur sipil negara guru per bulan dikalikan dengan jumlah pegawai aparatur sipil negara guru.
 - e. Rata-rata tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan per pegawai aparatur sipil negara guru sebagaimana dimaksud dalam huruf d dihitung berdasarkan jumlah anggaran tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan per daerah per bulan dibagi dengan jumlah pegawai aparatur sipil negara guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - f. Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e lebih besar dari jumlah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, data yang digunakan merupakan data yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- KEEMPAT : Perhitungan alokasi tambahan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekaligus memperhitungkan perbaikan alokasi tambahan dana alokasi umum Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Alokasi tambahan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disalurkan secara sekaligus paling cepat pada bulan Oktober tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Rincian alokasi tambahan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan oleh:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Transfer Umum sebagai dasar untuk menyalurkan dana alokasi umum sebagai tambahan dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pegawai aparatur sipil negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan dalam penyaluran anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2024; dan
 - b. Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk mencatat penerimaan dana alokasi umum sebagai tambahan dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pegawai aparatur sipil negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; dan
9. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 416 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN
ANGGARAN 2024 DALAM RANGKA DUKUNGAN
PENDANAAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

A. ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 PER DAERAH

dalam rupiah

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU 2024
1	2	3
1	Provinsi Aceh	2.209.708.573.000
2	Kab. Aceh Barat	602.391.336.000
3	Kab. Aceh Besar	800.641.423.000
4	Kab. Aceh Selatan	645.190.588.000
5	Kab. Aceh Singkil	467.400.868.000
6	Kab. Aceh Tengah	630.741.138.000
7	Kab. Aceh Tenggara	594.792.072.000
8	Kab. Aceh Timur	871.118.799.000
9	Kab. Aceh Utara	985.342.739.000
10	Kab. Bireuen	890.814.172.000
11	Kab. Pidie	893.592.730.000
12	Kab. Simeulue	454.285.303.000
13	Kota Banda Aceh	588.912.012.000
14	Kota Sabang	361.879.778.000
15	Kota Langsa	457.655.465.000
16	Kota Lhokseumawe	455.755.284.000
17	Kab. Gayo Lues	459.844.896.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	456.772.928.000
19	Kab. Aceh Jaya	437.723.569.000
20	Kab. Nagan Raya	546.159.785.000
21	Kab. Aceh Tamiang	556.497.207.000
22	Kab. Bener Meriah	484.649.938.000
23	Kab. Pidie Jaya	434.960.579.000
24	Kota Subulussalam	344.474.885.000
25	Provinsi Sumatera Utara	2.904.966.554.000
26	Kab. Asahan	931.476.359.000
27	Kab. Dairi	650.948.740.000
28	Kab. Deli Serdang	1.707.252.975.000
29	Kab. Karo	741.308.543.000
30	Kab. Labuhanbatu	703.270.785.000
31	Kab. Langkat	1.278.300.316.000
32	Kab. Mandailing Natal	870.070.825.000
33	Kab. Nias	442.579.434.000
34	Kab. Simalungun	1.451.560.802.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	686.582.207.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	651.549.789.000

B. RINCIAN ALOKASI TAMBAHAN DANA ALOKASI UMUM KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMBERIAN DUKUNGAN PENDANAAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA GURU YANG GAJI POKOKNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TIDAK MENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2024

dalam Rupiah

NO	DAERAH	ALOKASI		
		TUNJANGAN HARI RAYA	GAJI KETIGA BELAS	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Provinsi Aceh	61.558.376.000	62.300.701.000	123.859.077.000
2	Kab. Aceh Besar	6.532.767.000	6.532.767.000	13.065.534.000
3	Kab. Aceh Singkil	2.839.675.000	2.839.675.000	5.679.350.000
4	Kab. Aceh Tengah	4.788.937.000	4.756.515.000	9.545.452.000
5	Kab. Aceh Tenggara	4.483.778.000	4.458.275.000	8.942.053.000
6	Kab. Aceh Timur	6.753.211.000	6.753.211.000	13.506.422.000
7	Kab. Aceh Utara	12.804.316.000	12.751.376.000	25.555.692.000
8	Kab. Pidie	7.465.281.000	7.433.571.000	14.898.852.000
9	Kab. Simeulue	1.876.188.000	1.810.555.000	3.686.743.000
10	Kota Sabang	255.935.000	245.604.000	501.539.000
11	Kota Langsa	2.604.248.000	2.604.248.000	5.208.496.000
12	Kota Lhokseumawe	3.058.689.000	3.058.689.000	6.117.378.000
13	Kab. Aceh Jaya	3.210.777.000	3.376.622.000	6.587.399.000